

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Realisasi pembangunan ekonomi berperan sebagai satu dari beberapa sarana utama untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, secara khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia. Sejak Era reformasi, arah realisasi pembangunan di Indonesia diketahui tidak lagi menitikberatkan pada pencapaian perekonomian tetapi juga upaya peningkatan terhadap kualitas hidup bagi masyarakat dengan keseluruhan. Indeks pembangunan manusia yang diperkenalkan pada Program United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990, berfungsi sebagai ukuran utama untuk menilai keberhasilan pembangunan. IPM dirancang sebagai indikator komposit yang mencerminkan tiga dimensi utama: yakni terkait pada kesehatan, dilakukan pengukuran pada harapan hidup saat lahir; pendidikan, diukur dengan mengaplikasikan rata-rata lama tahun sekolah dan juga perkiraan harapan lama sekolah; dan juga standar hidup yang memiliki kelayakan, dilakukan pengukuran dengan memanfaatkan pengeluaran pada perkapita yang dilakukan penyesuaian. Menurut Gumelar (2025) dalam Jurnal Pembangunan Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Konsep dan Implikasi Terhadap Pembangunan Di Indonesia, menyatakan bahwa pembangunan sejati harus dianggap sebagai perluasan kemampuan (*capabilities*) individu dalam merealisasikan kehidupan yang bernilai menurut perspektif mereka, bukan semata-mata berfokus pada akumulasi material ekonomi.

Di Indonesia, pembangunan ekonomi daerah menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang menekankan pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah. Badan Pusat Statistik (BPS) mewartakan bahwa pada tahun 2024 perekonomian menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi nasional mencapai sekitar 5,03%, tetapi distribusinya tidak merata, dengan daerah-daerah di Jawa masih mendominasi dalam agregasi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori wilayah dengan tingkat konsentrasi penduduk yang tinggi di Indonesia dengan populasi lebih dari 37 juta jiwa, mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,2% selama periode 2015-2024, didorong oleh sektor industri dan pertanian (BPS, 2024). Meskipun demikian, capaian IPM provinsi tersebut pada tahun 2024 baru mencapai 73,80 sehingga secara subjektif masih berada di bawah rata-rata nasional dengan sebesar 75,02 sehingga menyajikan pemahaman bahwa pertumbuhan perekonomian belum secara sepenuhnya ditafsirkan menjadi suatu peningkatan dari kualitas sdm (BPS, 2024).

Kabupaten Kendal berada di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang dan Laut Jawa, sehingga memiliki letak yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Entitas ini mencatatkan kuantitas demografis sekitar 1,06 juta jiwa pada tahun 2024 dengan cakrawala administratif mencakup 1.002,23 km² (BPS, 2025). Kendal telah mengalami akselerasi pembangunan sejak ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal merupakan kebijakan strategis pemerintah di bidang industri dan investasi yang diarahkan untuk mempercepat

pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung perekonomian nasional. KEK Kendal secara resmi ditetapkan melalui Melalui legitimasi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019, PT Kawasan Industri Kendal (KIK) secara resmi mengemban peran sebagai entitas pengelola utama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Secara geospasial, kawasan ini menempati lokus strategis di Kecamatan Kaliwungu dan Brangsong yang diintegrasikan dengan simpul infrastruktur krusial, seperti koridor tol Trans Jawa, dermaga multiguna, dan moda kereta api demi menjamin akselerasi distribusi logistik.

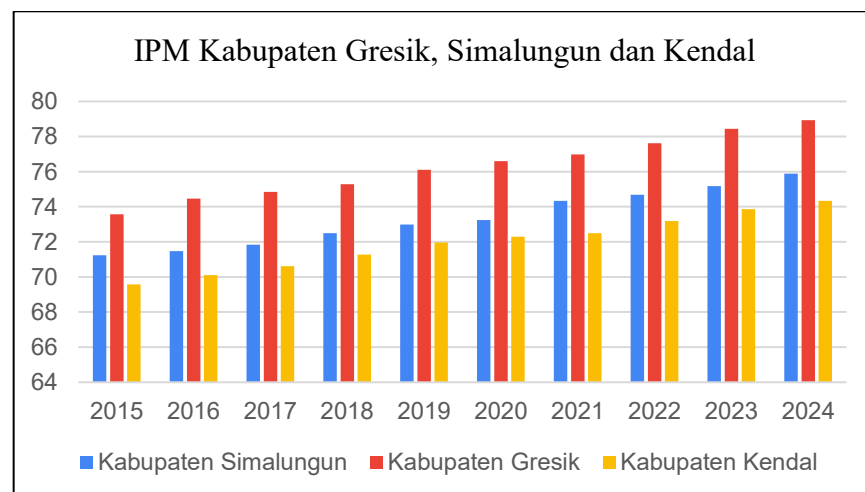
Kawasan Ekonomi Khusus secara konseptual merupakan suatu wilayah tertentu dalam suatu negara yang diberikan berbagai kemudahan investasi, insentif perpajakan, beserta fasilitas fiskal, dan konsesi nonfiskal yang didesain untuk menjangkau ekspansi investasi lintas batas negara dalam kuantitas yang eksponensial. Kawasan Ekonomi Khusus Kendal dikembangkan dengan fokus pada sektor industri, ekspor, logistik, dan manufaktur berbasis teknologi, termasuk subsektor tekstil, otomotif, elektronik, serta berbagai sektor pendukung lainnya. Pengembangan kawasan ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, mendorong masuknya investasi asing langsung, serta memperluas kapasitas produksi ekspor yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Skema insentif yang ditawarkan dalam kawasan ini diantaranya ialah pembebasan atau keringanan pajak, kemudahan dalam proses perizinan, serta penyediaan layanan satu pintu bagi pelaku usaha, hal ini menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan untuk menanamkan modal di wilayah tersebut. Investasi yang masuk tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi dan ekspor, tetapi

juga membuka peluang kerja dalam jumlah besar bagi masyarakat lokal maupun sekitarnya sehingga memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, di balik capaian ekonomi dan peningkatan investasi yang cukup signifikan, pengembangan KEK Kendal juga menghadirkan berbagai tantangan lingkungan dan sosial yang perlu mendapat perhatian serius. Proliferasi zona industri serta konversi lahan agraris dan ruang terbuka hijau menciptakan presi kontemporer terhadap integritas ekosistem setempat yang memicu transformasi spasial secara masif sekaligus mengeskalasi kerentanan terhadap sustainabilitas lingkungan. Transformasi fungsional lahan tersebut mengancam eksistensi lahan produktif dan mengatalisasi mutasi tata guna lahan yang pada akhirnya memicu marginalisasi akses terhadap aset ekologis yang menjadi sumber penghidupan vital komunitas lokal.

Gambar 1.1 Perbandingan IPM Dengan Daerah Kawasan Ekonomi Khusus Lain



Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Simalungun dan Kendal (Diolah 2025)

Gambar grafik 1.1 menyajikan analisis komparatif mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kendal, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Simalungun selama periode 2015-2024. Ketiga wilayah tersebut

merupakan daerah yang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan proses industrialisasi.

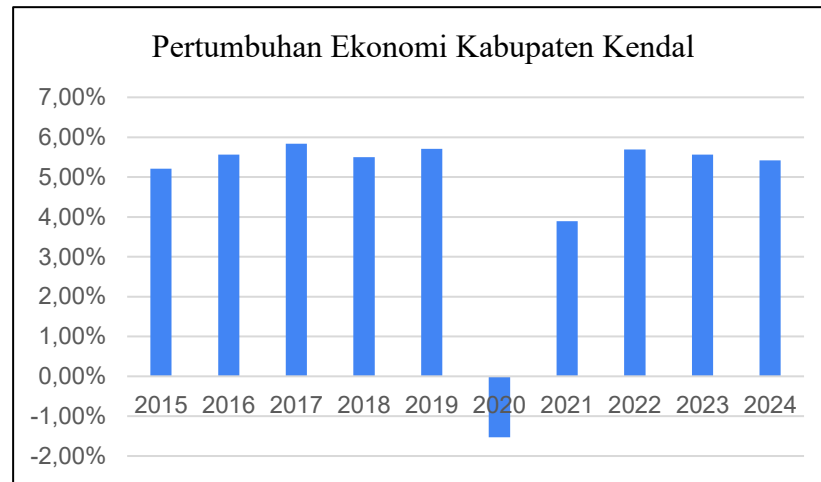
Secara umum, dapat diamati bahwa Kabupaten Gresik memiliki tingkat IPM tertinggi serta menunjukkan tren peningkatan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan dua wilayah lainnya. Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Kendal juga mengalami peningkatan IPM secara bertahap, tetapi laju pertumbuhannya cenderung lebih lambat. Secara khusus, Kabupaten Kendal meskipun menunjukkan kenaikan IPM dari kategori sedang menuju kategori tinggi, masih memiliki selisih capaian yang cukup besar dibandingkan dengan Kabupaten Gresik hingga akhir periode pengamatan.

Perbedaan capaian IPM antarwilayah menunjukkan bahwa keberadaan KEK tidak selalu diikuti oleh peningkatan pembangunan manusia yang sama pada setiap daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam efektivitas pemanfaatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan kebijakan pengupahan dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di masing-masing daerah.

Untuk memahami dinamika pembangunan di Kabupaten Kendal, penting untuk menganalisis indikator-indikator kunci seperti pertumbuhan ekonomi, aspek tenaga kerja, serta penetapan upah minimum, dan IPM selama periode 2015-2024. Data sekunder dari BPS Kabupaten Kendal dan BPS Jawa Tengah menunjukkan tren yang menarik yang akan diilustrasikan melalui empat grafik berikut. Grafik-grafik ini tidak hanya menyajikan data secara visual, tetapi juga menjadi dasar identifikasi fenomena masalah dalam penelitian ini. Melalui penyajian grafik

tersebut, pola perubahan dan keterkaitan antarvariabel dapat diamati secara lebih jelas dari waktu ke waktu. Selain itu, visualisasi data ini membantu memperkuat argumentasi awal dalam perumusan hipotesis penelitian.

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal

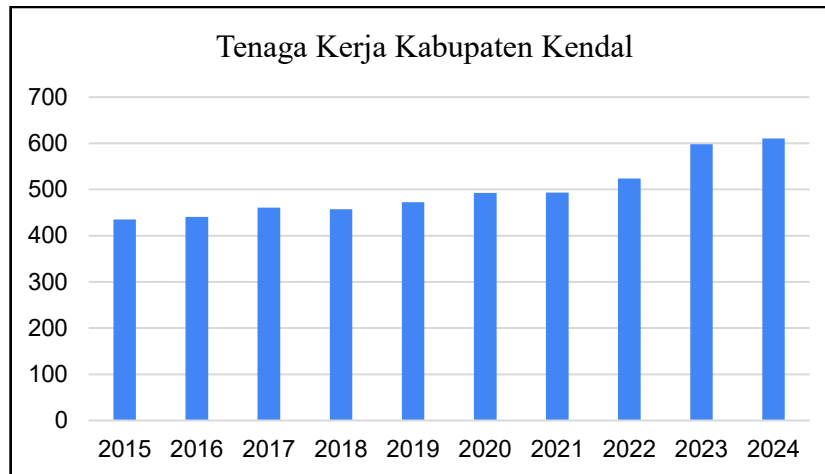


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal (Diolah 2025)

Grafik 1.2 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal selama periode 2015-2024 yang diukur melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Dinamika ekonomi secara umum menunjukkan pola fluktuatif, tetapi tetap mencerminkan capaian yang relatif substansial. Dalam kurun waktu 2015-2019, tingkat pertumbuhan tercatat melampaui 5 persen dan mencapai puncak pada tahun 2017 sebesar 5,84%, angka ini mencerminkan ekspansi sektor industri sebelum pandemi. Tahun 2020 ditandai dengan terjadinya kontraksi ekonomi sebesar -1,53 persen sebagai implikasi dari merebaknya pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas produksi dan mobilitas di KEK Kendal. Pasca-pandemi, perekonomian kembali pulih dengan pertumbuhan sebesar 3,89% pada 2021 dan stabil di atas 5 persen hingga 2024. Pemulihan ekonomi yang berlangsung secara bertahap ini mencerminkan resiliensi ekosistem industri di kawasan tersebut, di mana diversifikasi sektor manufaktur,

peningkatan investasi asing langsung, serta kebijakan insentif fiskal yang diterapkan pemerintah daerah turut menjadi katalis utama dalam mendorong akselerasi pertumbuhan pasca krisis kesehatan global.

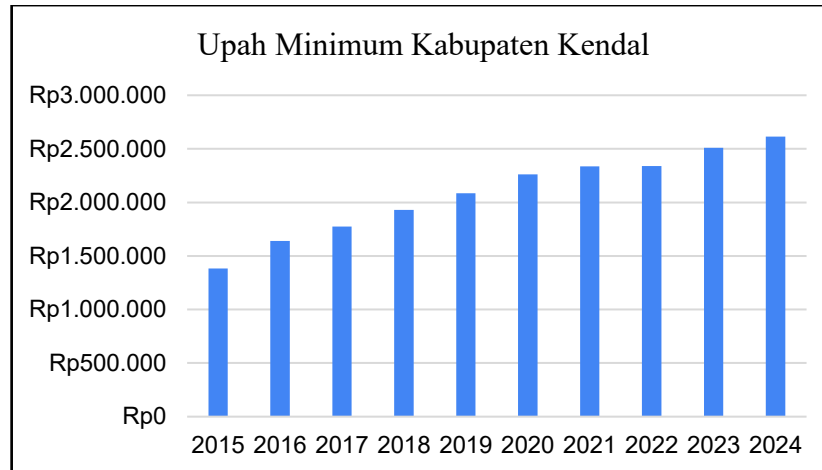
Gambar 1.3 Tenaga Kerja Kabupaten Kendal



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal (diolah 2025)

Gambar 1.3 menyajikan perkembangan tenaga kerja di Kabupaten Kendal selama periode 2015 hingga 2024 yang menunjukkan peningkatan relatif stabil dan progresif. Jumlah tenaga kerja meningkat dari 435.045 orang pada 2015 menjadi 610.192 orang pada 2024, atau sekitar 40% secara kumulatif. Peningkatan ini terutama terjadi di sektor industri setelah penetapan Kawasan ekonomi khusus mulai beroperasi yang mencerminkan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Selama periode yang sama, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,01% menjadi 4,60%, sementara partisipasi angkatan kerja tetap stabil di atas 76%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meningkatnya kesempatan kerja dapat memperkuat akumulasi keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ketersediaan lapangan kerja yang lebih luas berperan sebagai katalisator dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi jangka panjang.

Gambar 1.4 Upah Minimum Kabupaten Kendal

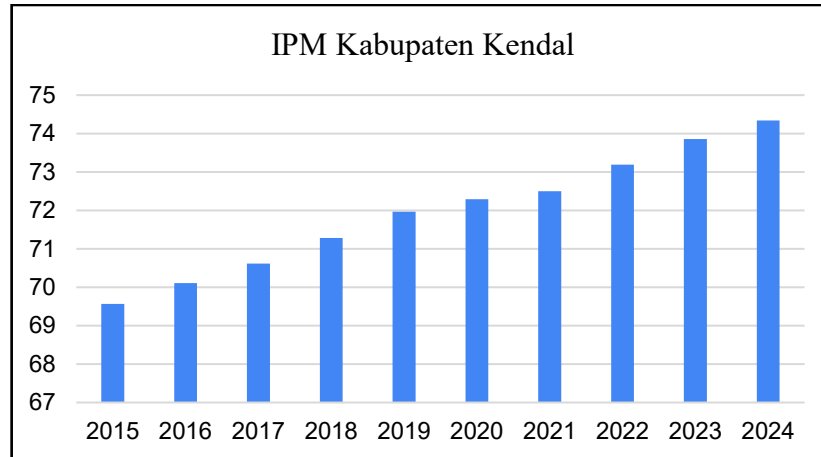


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal (diolah 2025)

Gambar grafik 1.4 menyajikan perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kendal selama periode 2015 hingga 2024 dalam satuan rupiah. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat adanya peningkatan yang konsisten dan cenderung linier. Pada tahun 2015, UMK tercatat sebesar Rp1.383.450, kemudian meningkat menjadi Rp1.639.600 pada tahun 2016, Rp1.774.867 pada tahun 2017, dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp2.613.573 pada tahun 2024. Secara rata-rata, kenaikan UMK berada pada kisaran 8-10% per tahun, dengan lonjakan yang lebih tinggi terjadi pascapandemi sebagai upaya penyesuaian terhadap inflasi. Data resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (2025) menunjukkan bahwa UMK Kendal menempati posisi ketiga tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2024, setelah Kota Semarang dan Kabupaten Demak, dengan kenaikan sebesar 6,5% menjadi Rp2.783.455 pada tahun 2025. Penetapan kenaikan tersebut mengacu pada formula Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022. Secara teoritis, peningkatan upah minimum dapat mendorong terjadinya *trickledown effect*, yaitu kondisi di mana kenaikan pendapatan pekerja berdampak pada peningkatan konsumsi serta investasi

pada sumber daya manusia (Sulistiawati, 2012). Namun, di Kabupaten Kendal, kenaikan ini belum sepenuhnya mengatasi biaya hidup yang naik akibat ekspansi industri, seperti harga properti dan pangan di sekitar KEK.

Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal (diolah 2025)

Representasi visual pada Grafik 1.5 mengilustrasikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kendal yang menunjukkan eskalasi inkremental yang relatif moderat. Dimulai dari angka 69,57 (kategori sedang) pada 2015, IPM secara bertahap bertransformasi hingga menyentuh ambang 74,34 (kategori tinggi) pada 2024. Secara statistik, rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 0,53 poin menunjukkan disparitas performa jika dikomparasikan dengan rerata capaian Provinsi Jawa Tengah (0,79 poin) maupun level nasional. Dinamika ini didominasi oleh perbaikan paritas daya beli, sementara dimensi edukasi masih mengalami stagnansi relatif, sebagaimana tercermin dari angka rata-rata lama sekolah yang hanya mencapai 7,8 tahun pada 2024.

Keempat grafik tersebut menjadi gambaran yang dapat diidentifikasi untuk mengetahui adanya fenomena paradoks pembangunan di Kabupaten Kendal. Meskipun pertumbuhan ekonomi sudah tergolong tinggi, tetapi penyerapan tenaga kerja, kenaikan tingkat upah minimum serta indeks pembangunan manusia (IPM)

hanya menunjukkan eskalasi yang bersifat inkremental dan terbatas. Kondisi ini mencerminkan bahwa distribusi hasil pertumbuhan belum berlangsung secara proporsional di kalangan masyarakat. Ekspansi KEK Kendal saat ini masih cenderung memberikan manfaat yang lebih besar bagi investor dan tenaga kerja terampil yang berasal dari luar daerah. Di sisi lain, sebagian masyarakat lokal masih dihadapkan pada pekerjaan dengan tingkat keterampilan rendah, pendapatan yang terbatas, serta akses yang belum optimal terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Fenomena ini mengindikasikan terjadinya gap struktural antara ekspansi ekonomi dan kapabilitas modal manusia yang memanifestasikan karakteristik fundamental dalam kontestasi pembangunan wilayah tersebut.

Lebih lanjut, meskipun indikator ekonomi memperlihatkan kecenderungan yang positif, komponen pendidikan dan kesehatan dalam IPM masih mengalami perkembangan yang relatif lambat. Durasi pendidikan formal penduduk setempat belum menunjukkan korelasi positif yang signifikan terhadap penguatan kapabilitas modal manusia di tengah pesatnya ekspansi ekonomi daerah sehingga kondisi ini berpotensi menghambat mobilitas sosial serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. Di sisi lain, kenaikan upah minimum, meskipun memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pekerja, belum sepenuhnya mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup di sekitar kawasan KEK sehingga tekanan ekonomi masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Keadaan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi yang berkelanjutan yang apabila tidak ditangani secara tepat dapat memperlebar kesenjangan pembangunan antar kelompok masyarakat di Kabupaten Kendal.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk memahami interaksi antara dinamika pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan, tingkat upah minimum, dan IPM secara komprehensif, orientasi kebijakan pembangunan seyogianya tidak hanya berpusat pada akselerasi investasi dan proliferasi okupasi, melainkan juga mampu mengeskalasi kualitas hidup kolektif secara inklusif. Selain itu, urgensi teoretis penelitian ini berlandaskan pada probabilitas hambatan terhadap aspek fundamental Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan ke-8 (*Decent Work and Economic Growth*) serta tujuan ke-10 (*Reduced Inequalities*), jika distorsi ekonomi tersebut tidak dimitigasi secara presisi.

Penelitian ini secara spesifik mengonseptualisasikan hubungan antara akselerasi ekonomi, dinamika ketenagakerjaan, dan standar pengupahan terhadap IPM di Kabupaten Kendal selama satu dekade terakhir dengan metodologi regresi linier berganda. Urgensi dari studi ini terletak pada penyediaan basis bukti (*evidence based*) untuk formulasi kebijakan yang lebih berkeadilan sehingga orkestrasi pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga mengatalisasi peningkatan taraf hidup kolektif secara merata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kendal periode 2015-2024?
2. Apakah jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kendal periode 2015-2024?

3. Apakah upah minimum kabupaten (UMK) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kendal periode 2015-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kendal pada periode 2015-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kendal pada periode 2015-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten (UMK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kendal pada periode 2015-2024.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini dibatasi pada aspek wilayah kajian, variabel yang digunakan, periode waktu penelitian, serta pendekatan analisis yang diterapkan. Penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dengan mempertimbangkan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal yang mulai beroperasi sejak tahun 2019. KEK Kendal berkembang sebagai kawasan strategis yang mendorong aktivitas industri manufaktur di Jawa Tengah. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Kendal sebagai lokus yang signifikan bagi analisis interkoneksi antara performa ekonomi dan progresi kualitas hidup, terutama dalam

kerangka kerja wilayah yang mengalami transformasi struktural menuju sektor industri.

Pada kerangka operationalisasi variabel, kajian ini memposisikan indeks pembangunan manusia atau IPM sebagai Variabel terikat. Secara simultan, variabel independen yang diintegrasikan mencakup pertumbuhan ekonomi regional, serta dimensi ketenagakerjaan yang diestimasi melalui kapasitas absorpsi tenaga kerja, ditambah kebijakan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Pemilihan jajaran variabel tersebut didasarkan pada justifikasi teoretis mengenai korelasi fungsionalnya terhadap eskalasi kualitas hidup serta prosperitas kolektif masyarakat.

Secara metodologis, penelitian ini memanfaatkan data longitudinal periode 2015-2024 guna melakukan observasi komprehensif terhadap evolusi pembangunan wilayah. Periodisasi ini dipilih untuk membedah implikasi struktural sebelum dan sesudah operasionalisasi KEK Kendal, sekaligus menginkorporasikan disrupsi makroekonomi dari pandemi COVID-19 serta akselerasi rekoneksi ekonomi pada masa pemulihan selanjutnya.

Metodologi pemrosesan data dalam penelitian ini menerapkan teknik regresi linier berganda pada data runtun waktu. Tahapan komputasi melibatkan pengujian hipotesis secara individual melalui statistik t dan secara kolektif melalui statistik F. Selain itu, daya jelas model terhadap fluktuasi variabel terikat dievaluasi lewat koefisien determinasi. Untuk memitigasi risiko bias estimasi, dilakukan verifikasi terhadap asumsi klasik yang meliputi parameter multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas. Hal ini dilakukan demi memastikan bahwa output analisis memiliki derajat presisi yang tinggi serta kredibilitas akademik.

1.5 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

1. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini berupaya menghadirkan kesempatan terhadap penulis untuk mengaplikasikan pengetahuan pada bidang ekonomi pembangunan secara empiris, berupaya ditingkatkannya kemampuan analisis regresi dan interpretasi data sekunder, serta memperdalam pemahaman tentang pertumbuhan di kawasan ekonomi khusus. Pengalaman ini memperkuat kompetensi akademik dan profesional penulis di bidang kebijakan pembangunan regional, serta melatih kemampuan berpikir kritis dalam merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti empiris.

2. Manfaat bagi Masyarakat Umum

Output penelitian ini didestinasikan untuk memperkuat kapasitas kognitif Masyarakat Kabupaten Kendal mengenai adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh KEK dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hasilnya dapat mendorong partisipasi aktif dalam program pelatihan keterampilan dan pendidikan, serta memperkuat tuntutan terhadap kebijakan yang lebih inklusif sehingga hasil pembangunan dapat terdistribusi secara merata di kalangan masyarakat lokal. Hal ini pada akhirnya menciptakan siklus ekonomi positif di mana peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal berjalan beriringan dengan perluasan akses kesejahteraan yang lebih berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan justifikasi ilmiah bagi otoritas daerah untuk mengatasi diskrepansi antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Temuan ini dapat diimplementasikan sebagai landasan strategis dalam penyusunan kurikulum vokasional, sinkronisasi anggaran sosial kesehatan yang lebih akurat, serta bahan diskursus kritis mengenai kebijakan pengupahan dan dinamika ketenagakerjaan di Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan demikian, output makroekonomi dapat bertransformasi menjadi instrumen pengungkit pembangunan manusia yang berkeadilan secara struktural.